

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebuah daerah. Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya Sistem Inovasi Daerah dibentuk. Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Sistem inovasi dibutuhkan oleh karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat, dan pengelolaan SDM kolaboratif serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat. Kondisi ini mendesak dibentuknya suatu sistem untuk mengatasi permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Prinsip-Prinsip dalam Pengembangan Strategi Inovasi Daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun

bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Tujuan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah yaitu: (a) visi pembangunan ekonomi lokal berbasis IPTEKMAS, (b) mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan, (c) mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi, (d) proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring, (e) memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan, (f) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja, (g) menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor, (h) menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

Konsep pengembangan SIDA yang dapat dilakukan dengan menggunakan model SIDA *Government Procurement Model* atau *Framework Condition Model* atau kedua-duanya. Untuk pengembangan model SIDA diperlukan 18 langkah komprehensif yaitu: (1) identifikasi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat, (2) penentuan prioritas utama pengembangan dan sasaran, (3) Sosialisasi Awal Program dan dialog partisipatif masyarakat, (4) identifikasi kebutuhan dan masalah yang ada, (5) analisa SWOT, (6) penyiapan dan penunjukan “Champion” program, (7) penyiapan pendamping, (8) pembentukan Organisasi/Komite Tingkat Lokal, (9) penyiapan Forum Komunikasi antar Lembaga dan Organisasi, (10) kolaborasi, keterlibatan, networking Kelembagaan, (11) pelatihan, workshop, seminar, dan pendampingan, (12) pemberian insentif modal/bantuan, (13) pengembangan pusat informasi dan basis data, (14) pemberian bantuan modal pinjaman lunak dan pendampingan insentif. (15) peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi, (16) pengembangan industri: turunan, terkait dan pendukung, (17) promosi dan pameran produk dan potensi, (18) monitoring dan evaluasi.

Kerangka kebijakan SIDA meliputi enam agenda inovasi. “Pertama yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, kedua

memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, termasuk UKM. Agenda ketiga yaitu menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik terbaik dan hasil litbang. Sementara agenda keempat adalah mendorong budaya inovasi. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah serta penyelarasan dengan perkembangan global merupakan dua agenda inovasi lainnya yang harus dilakukan

Untuk mendukung berjalannya SIDA dengan baik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat: (1) mendukung pengembangan SDM daerah dengan memberikan pelatihan, dan pendidikan, dan sebagainya, (2) mendukung kerjasama tripartite (industri, lembaga riset pemerintah, universitas) tingkat daerah, antar daerah, dan dalam skala nasional. Menguatkan aktivitas dan fungsi institusi riset daerah untuk menjadi pendorong industri daerah dengan mempermudah pertukaran SDM antar daerah, (3) memindahkan sebagian dari fungsi riset Pemerintah Pusat ke daerah dalam Balai Besar Industri (BBI) atau membentuk beberapa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Daerah (BPPTD) dalam beberapa kawasan tertentu.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu (1) menentukan produk unggulan untuk tingkat DATI I yang merupakan kumpulan dari unggulan produk dari DATI II, (2) mendukung pembangunan sekolah-sekolah professional kejuruan yang mengarah kepada bidang teknologi (untuk DATI II), sedang untuk DATI I adalah pembangunan sekolah tinggi yang mengarah kepada penelitian yang berhubungan dengan kompetensi inti DATI I tersebut. Intinya pusat inovasi di daerah merupakan bentuk dari hasil kerja sama yang kuat antara unsur lembaga Litbang, akademisi, dunia usaha dan masyarakat di daerah di mana peran pemerintah daerah menjadi bagian terpenting dalam pengembangannya. Dengan munculnya produk-produk unggulan daerah yang dikemas dengan teknologi yang diproduksi para pelaku usaha di daerah, maka akan semakin meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

Kajian ini membahas tanaman Porang, tanaman porang mempunyai prospek yang menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi yang bisa dibudidayakan. Selain itu, Porang banyak sekali terutama untuk industri dan kesehatan, hal ini terutama karena kandungan zat Glucomanan yang ada di dalamnya. Beberapa manfaat umbi porang yang lainnya antara lain: (a) bahan lem, (b) jely, (c) mie, (d) tahu, (e) felem, (f) perekat tablet, (g) pembungkus kapsul, (h) penguat kertas. Tanaman porang (*amorphopallus oncophillus*) merupakan tanaman yang hidup di hutan tropis. Tanaman yang bisa juga ditanam di dataran rendah tersebut mudah hidup di antara tegakan pohon hutan seperti misalnya Jati dan Pohon Sono. Porang di daerah Jawa dikenal dengan nama iles-iles atau suweg. Termasuk tumbuhan semak (herba) yang memiliki tinggi 100 – 150 cm dengan umbi yang berada di dalam tanah. Batang tegak, lunak, batang halus berwarna hijau atau hitam belang-belang (totol-totol) putih. Batang tunggal memecah menjadi tiga batang sekunder dan akan memecah lagi sekaligus menjadi tangkai daun. Pada setiap pertemuan batang akan tumbuh bintil/ katak berwarna coklat kehitam-hitaman sebagai alat perkembangbiakan tanaman Porang. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter sangat tergantung umur dan kesuburan tanah. Umbi inilah yang akan dipungut hasilnya karena memiliki zat glukomanan.

Sebagai acuan untuk pembentukan struktur organisasi dan pola pengembangan SIDA Porang dapat digunakan pola pengembangan SIDA Porang yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Madiun.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pengembangan SIDA Porang?
- b. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan SIDA Porang?
- c. Apa saja yang menjadi faktor pendukung pengembangan SIDA Porang?
- d. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pengembangan SIDA Porang?
- e. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan pengembangan SIDA Porang atau meningkatkan capaian saat ini yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah?

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini mempunyai tujuan mengidentifikasi:

- a. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pengembangan SIDA Porang.
- b. Mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan SIDA Porang.
- c. Mengetahui faktor-faktor pendukung pengembangan SIDA Porang
- d. Mengetahui faktor-faktor penghambat pengembangan SIDA Porang
- e. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan pengembangan SIDA Porang.

1.4. Hasil yang Diharapkan

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SIDA Porang di Jawa Timur.
- b. Ketersediaan database komprehensif dan laporan Implementasi Pengembangan SIDA Porang di kawasan hutan Jawa Timur beserta Pola Pengembangan dan Struktur Organisasi SIDA Porang di tingkat Propinsi Jawa Timur.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data penerapan dan strategi pengembangan SIDA Porang yang telah dilaksanakan di lokasi kajian.